

# **ANALISIS PEMECAHAN AKAR MASALAH KEMISKINAN DI PAPUA BARAT MELALUI DANA DESA**

Affan Gustiawan Saputra, Aditya Nugroho, M. Aji Ma'ruf Saputro, Wahyu Fahrudin,  
Yohanes Ibertus Goo

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

## **Abstract**

The problem of poverty is a serious problem for West Papua considering that the percentage of poor people in West Papua is relatively high compared to other regions. Therefore, poverty alleviation is important. One effective way is to determine the root cause of poverty first. Considering that the majority of poverty in West Papua is in rural areas, it can be seen that it is related to the village funds that are distributed. In fact, the fields that touch the community directly are closely related to solving the root problems of poverty such as community empowerment..

## **Abstrak**

Masalah kemiskinan menjadi masalah yang serius bagi Papua Barat mengingat persentase penduduk miskin Papua Barat tergolong tinggi dibandingkan daerah lainnya. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi penting dilakukan. Salah satu cara yang efektif dengan menentukan akar masalah kemiskinan terlebih dahulu. Mengingat mayoritas kemiskinan di Papua Barat berada di pedesaan maka dapat dilihat hubungannya dengan dana desa yang disalurkan. Ternyata, bidang yang menyentuh masyarakat langsung yang berhubungan erat dengan pemecahan akar masalah kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat.

**Keywords:** dana desa, kemiskinan, masyarakat, papua barat

## PENDAHULUAN

Papua Barat dikenal dengan pesona alam yang indah dan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut tidak hanya pariwisata, tetapi juga pertambangan, kehutanan, perikanan, dan kelautan. Secara harfiah, potensi alam ini digambarkan dalam beberapa unsur lambang daerah Papua Barat berupa menara kilang, pohon, dan ikan. Menara kilang menggambarkan potensi pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Potensi ini dapat terlihat dari tingginya kontribusi sektor migas terhadap PDRB, yakni  $\pm 40\%$  dari total PDRB setiap tahunnya. Migas utamanya gas alam (BPS Papua Barat, 2021). Adapun pohon menggambarkan potensi sektor kehutanan yang begitu besar. Luas kawasan hutan dan perairan mencapai 9,6 juta hektar atau sebesar 93% dari luas wilayah Papua Barat (BPS Papua Barat, 2021). Sedangkan ikan menggambarkan potensi sektor perikanan yang juga cukup besar dengan total hasil perikanan laut mencapai 144 ribu ton (BPS Papua Barat, 2021). Masyarakat Papua Barat termasuk dalam masyarakat yang melakukan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal masing-masing suku (WWF, 2010). Masyarakat yang tinggal di wilayah dekat pesisir pantai memiliki kearifan dalam melestarikan sumber daya laut. Bentuk dari kearifan lokal diantaranya adalah penangkapan ikan yang masih menggunakan penggunaan alat tradisional seperti

kalawai atau penikam. Selain itu, masyarakat Papua Barat juga memiliki budaya sasi. Budaya ini diterapkan pada beberapa jenis ikan agar tidak ditangkap terlebih dahulu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kearifan lokal tersebut perlu dijaga demi melestarikan lingkungan hidup.

Namun demikian, kearifan lokal yang di satu sisi berdampak positif pada lingkungan hidup di sisi lainnya menimbulkan permasalahan. Masalah tersebut adalah kemiskinan pada sebagian besar masyarakat meskipun memiliki kekayaan hutan dan potensi alam yang besar (WWF, 2010). Dengan kata lain, pemanfaatan kekayaan hutan dan potensi alam lainnya secara apa adanya membuat masyarakat Papua Barat terjebak dalam kemiskinan.

Kemiskinan selalu menjadi masalah yang serius dan penting untuk segera diselesaikan, utamanya di Papua Barat. Berdasarkan data BPS Papua Barat, persentase penduduk miskin Papua Barat tahun 2021 sebesar 21,82% atau sebanyak 221,29 ribu jiwa. Jumlah tersebut tercatat bertambah 6,07 ribu jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilakukan perbandingan dengan wilayah lainnya di Indonesia, Papua Barat adalah provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kedua setelah Provinsi Papua.

Persentase penduduk miskin di Papua Barat didominasi oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Berdasarkan data BPS Papua Barat, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan pada

bulan Maret 2021 mencapai 191,06 ribu orang atau sebesar 87,2% dari total penduduk miskin di Papua Barat.

Melihat kondisi kemiskinan dengan keparahan yang tinggi terutama pada daerah pedesaan, membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah konsisten dalam upaya penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya. Upaya penanggulangan dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai kebijakan khususnya yang menasar ke daerah pedesaan seperti dana desa.

Penyaluran dana desa di Papua Barat sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 1,549 triliun rupiah atau sebesar 99,9% dari total alokasi (Simtrada). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan penyaluran hingga Rp8,77 miliar rupiah. Hal ini selaras dengan peningkatan alokasi dana desa yang mencapai Rp9,52 miliar rupiah. (Simtrada).

Adanya kebijakan dana desa diharapkan dapat menjadi sebuah upaya dalam penanggulangan kemiskinan di desa. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan sejak lama telah dilaksanakan dengan target penanggulangan yang cepat, namun demikian capaian indikator hingga saat ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Percepatan penanggulangan kemiskinan tidak terwujud dan seringkali memberikan dampak yang tidak diduga, berlawanan arah atau menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana desa telah secara

tepat mampu mengentaskan kemiskinan. Selain itu, perlu diketahui bagaimanakah bentuk kebijakan yang sesuai dan kondisi masyarakat atau selaras dengan kearifan lokal untuk mengentaskan kemiskinan. Kebijakan yang memberdayakan masyarakat dengan tetap menjaga tatanan alam dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka ditulislah kajian ini. Kajian ini ditulis untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap pemecahan masalah kemiskinan; melakukan identifikasi penyebab dan akar masalah kemiskinan di Papua Barat; dan memberikan rekomendasi/saran terkait penanggulangan kemiskinan melalui dana desa.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Identifikasi Penyebab Kemiskinan di Papua Barat**

Data yang dikumpulkan adalah data-data yang relevan dengan fokus kajian. Berdasarkan data yang dikumpulkan tersebut, dilakukan identifikasi penyebab kemiskinan, antara lain.

1. Keterbatasan aset/modal. Aset/modal yang terbatas menghambat pengembangan usaha masyarakat. Padahal pengembangan usaha harus dilakukan mengingat kebutuhan hidup terus meningkat seiring dengan inflasi.
2. Budaya/kearifan lokal yang melekat
3. Dampak Pertumbuhan ekonomi

4. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menggambarkan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (BPS, 2021). IPM berhubungan erat dengan kemiskinan karena salah satu dimensi pengukurannya adalah standar hidup layak.

Penyebab-penyebab kemiskinan tersebut sesuai dengan beberapa literatur terdahulu. Menurut Parinusa dan Waimbo (2020), pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Kabupaten Tambrau. Hal ini juga ditegaskan oleh Tubaka (2019) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan.

Sementara itu, IPM dan kemiskinan memiliki hubungan terbalik. Penurunan variabel IPM dapat meningkatkan variabel kemiskinan (Zuhdiyaty dan Kaluge, 2017). Penyebab kemiskinan lainnya adalah keterbatasan aset dan pendapatan (World Bank, 2000). Adapun budaya/kearifan lokal yang melekat merujuk pada kasus-kasus di Papua dan Papua Barat, contohnya adalah budaya masyarakat adat Marind-anim. Menurut WWF (2010), masyarakat adat Marind-anim memiliki kepercayaan terhadap totem tertentu yang berhubungan erat dengan karakteristik alam di sekitar tempat tinggalnya. Segala sesuatu yang bersimbiosis dengan totem tersebut akan dijaga kelestariannya. Hal itulah yang menyebabkan

rencana pembukaan lahan sawit 1 juta Ha ditentang keras oleh masyarakat. Rencananya lahan sawit dibangun di tanah ulayat yang memang tidak boleh dirusak karena menjadi tempat tinggal kasuari (WWF, 2010). Oleh karena itu, penyebab kemiskinan di Papua Barat tidak bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia saja tetapi juga harus memperhatikan aspek budaya/kearifan lokal masyarakat setempat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif berdasarkan studi literatur. Analisis berfokus pada hubungan antara penyerapan dana desa dengan penanggulangan akar masalah kemiskinan di Papua Barat. Analisis juga didukung dengan penggunaan metode root caused analysis (RCA), karena RCA memiliki nilai yang bisa menangkap gambaran masalah secara umum maupun detail (Williams, 2001). Pemahaman terkait sebab terjadinya sesuatu adalah kunci dalam mengembangkan rekomendasi yang efektif (Rooney dan Heuvel, 2004). Adapun langkah-langkah melakukan root caused analysis adalah sebagai berikut.

### **1. Pengumpulan data**

Adapun data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Kementerian Keuangan dan BPS Papua Barat. Data dari Kementerian Keuangan didapatkan dari aplikasi Online

Monitoring SPAN (OM-SPAN) dan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada). Sedangkan data dari BPS Papua Barat didapatkan dari website dan publikasi resmi BPS Papua Barat.

2. *Causal Factor Charting*

Kajian ini disusun berdasarkan studi literatur. Oleh karena itu, kajian ini tidak menggunakan Causal Factor Charting yang berbasis logical test tetapi menggunakan perbandingan hasil kajian terdahulu terkait penyebab masalah kemiskinan.

3. Identifikasi Akar Masalah

4. Rekomendasi dan Implementasi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi dan Analisis Akar Masalah Kemiskinan di Papua Barat

Penyebab kemiskinan di Papua Barat akan lebih mudah ditemukan solusinya jika akar masalah kemiskinannya dapat diidentifikasi. Identifikasi dan analisis akar masalah menggunakan RCA dengan alat bantu *fishbone diagram*. Kajian ini menggunakan *fishbone diagram* dengan data penyebab kemiskinan yang telah diidentifikasi sebelumnya (fishbone diagram terdapat pada Lampiran I). Adapun uraian akar masalah hasil analisis adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan aset/modal

- a. Kesulitan akses pembiayaan  
Pembiayaan dibutuhkan ketika aset/modal yang ada tidak mencukupi untuk

pengembangan usaha dan karir. Pembiayaan dapat menutupi kekurangan modal agar usaha tetap bertahan. Oleh karena itu, kemudahan akses pembiayaan sangat penting untuk meningkatkan akses modal masyarakat.

b. Keterbatasan

layanan/infrastruktur publik  
Jalan adalah salah satu layanan/infrastruktur yang ditujukan untuk masyarakat umum. Keberadaan jalan yang bagus dapat mempermudah akses transportasi baik untuk logistik, perjalanan, pengiriman, dan berbagai tujuan lainnya. Jika jalan yang ada rusak atau tidak layak, biaya yang timbul saat transportasi bisa jadi lebih besar. Hal ini berpotensi mengurangi keuntungan usaha karena biaya atau cost yang dibutuhkan menjadi lebih besar.

2. Budaya/kearifan lokal yang sangat melekat

Budaya/kearifan lokal sangat melekat pada masyarakat Papua Barat terutama pada masyarakat adat. Sebagian besar budaya tersebut erat kaitannya dengan lingkungan hidup sekitar. Beberapa budaya/kearifan lokal yang berpotensi menimbulkan masalah kemiskinan adalah sebagai berikut.

a. Ketergantungan

masyarakat pada alam dan

minimnya pengetahuan atas hak-hak sumber daya alam.

Menurut Forest Peoples Programme (2011), mayoritas masyarakat adat Papua Barat masih kurang memahami hak-hak kepemilikan/pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam yang dimiliki. Kurangnya pemahaman ini diperparah dengan sedikitnya akses informasi masyarakat adat terhadap rencana pemerintah terkait tanah dan sumber daya alam tersebut. Minimnya informasi tersebut menyebabkan terhambatnya pengembangan lahan dan sumber daya alam. Padahal pengembangan lahan dan sumber daya alam berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat adat. Hal ini patut menjadi perhatian karena sebagian besar masyarakat adat tinggal di daerah perdesaan dan masih tergolong miskin. Masyarakat adat yang tinggal di pedalaman dan pedesaan (kampung) masih sangat tergantung pada perburuan, pengumpulan dan pemanenan tanaman obat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan kesehariannya, serta tidak adanya upaya pengembangan (budidaya) dan pemberian nilai tambah

(FPP, 2011). Kegiatan tersebut dilakukan di dalam hutan dan perairan yang berada dalam wilayah penguasaan dan pengelolaan adat.

- b. Penggunaan alat, sarana, dan sistem pertanian/kehutanan yang masih tradisional  
Masyarakat adat Papua Barat masih tetap bertahan hingga kini menggunakan sarana, alat, dan sistem tradisional karena dianggap lebih ramah terhadap lingkungan hidup. Tujuan ini tentunya sangat positif. Akan tetapi, jika kondisi ini tetap berlanjut masyarakat adat bisa terpinggirkan karena kalah saing dengan masyarakat lain yang menggunakan alat, sarana, dan sistem pertanian/kehutanan yang modern. Sistem-sistem pertanian dan kehutanan modern memerlukan pekerja atau pengelola dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang khusus dan modern. Sedangkan sebagian besar masyarakat adat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan ini. Masalah ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah dapat mengadakan sosialisasi pengetahuan dan keterampilan pertanian dan kehutanan modern untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Pemerintah juga dapat menjalin komunikasi lebih dalam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adat terkait kepemilikan tanah dan sumber daya alam terutama ketika merencanakan pembangunan/pengembangan lahan pada tanah adat.

3. Dampak pertumbuhan ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat memiliki tingkat sensitivitas yang rendah dan negatif terhadap tingkat kemiskinan (KFR Papua Barat, 2021). Dampak pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi kurang menjangkau penduduk miskin. Berbagai sektor yang memiliki andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi berada di perkotaan sehingga manfaatnya hanya dinikmati oleh penduduk di perkotaan saja walaupun sebagian kecilnya dirasakan juga oleh penduduk pedesaan. Padahal 87,26% jumlah penduduk miskin di Papua Barat terkonsentrasi di daerah pedesaan. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh dari pertumbuhan ekonomi Papua Barat tidak memiliki dampak yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi ini juga ditunjukkan dari nilai PDRB per kapita Provinsi Papua Barat (KFR Papua Barat, 2021). PDRB per kapita adalah nilai kontribusi tiap penduduk dalam menghasilkan barang

dan jasa pada periode satu tahun. PDRB per kapita Papua Barat pada tahun 2021 sebesar Rp85,99 juta/tahun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp0,88 juta/tahun dari periode sebelumnya. Sayangnya, peningkatan PDRB per kapita tidak sejalan dengan capaian indikator kesejahteraan masyarakat. Tingginya nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh besarnya pendapatan sektor migas yang besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Sifat sektor migas yang padat modal menyebabkan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sedikit penduduk (6,35 persen dari seluruh penduduk bekerja).

4. Rendahnya IPM  
Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) merupakan salah satu indikator yang paling banyak digunakan dalam pembangunan sosial ekonomi (Biggeri dan Mauro, 2018). Daerah dengan IPM rendah berarti memiliki kualitas hidup dan kualitas pembangunan manusia yang rendah pula. Hal ini disebabkan IPM mencerminkan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Salah satu provinsi dengan IPM yang rendah jika dibandingkan data nasional adalah Papua Barat. Provinsi Papua Barat merupakan wilayah otonomi khusus yang karenanya mendapatkan alokasi dana transfer yang cukup besar untuk dapat meningkatkan IPM.

Pada tahun 2021, Provinsi Papua Barat masih tertinggal dari daerah lain dengan capaian nilai IPM yang terendah kedua di Indonesia sebesar 65,26 poin. (BPS, 2021). Rendahnya IPM dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Rendahnya kondisi kesehatan
  - b. Rendahnya tingkat pendidikan
  - c. Rendahnya Pengeluaran per Kapita
- Pengeluaran per kapita tidak hanya menjadi salah satu indikator IPM tetapi juga menjadi tolak ukur kemiskinan dalam formula BPS. BPS mengukur kemiskinan dengan membandingkan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dan garis kemiskinan. Jika rata-rata pengeluaran per kapita penduduk per bulan di bawah garis kemiskinan maka penduduk tersebut dapat dikatakan miskin.
- Pengeluaran per kapita yang berada di bawah garis kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penurunan atau bahkan hilangnya pendapatan yang selama ini diterima. Ketika pendapatan seseorang menurun, maka pengeluaran yang selama ini dilakukan bisa berkurang sesuai pendapatan tersebut. Oleh karena itu,

pendapatan per kapita masyarakat sangat penting untuk tetap dijaga dan ditingkatkan agar memastikan pengeluaran per kapitanya tetap bertahan.

### **Kebijakan Dana Desa dalam Memecahkan Akar Masalah Kemiskinan**

Penyaluran dana desa di Papua Barat sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai 1,549 triliun rupiah atau sebesar 99,9% dari total alokasi (Simtrada). Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terjadi peningkatan penyaluran hingga Rp8,77 miliar rupiah. Hal ini selaras dengan peningkatan alokasi dana desa yang mencapai Rp9,52 miliar rupiah. (Simtrada).

Adanya peningkatan alokasi dan penyaluran dana desa diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi, penanganan covid-19, dan mendukung sektor-sektor prioritas tiap desa, serta memecahkan akar masalah kemiskinan.

Jika dilihat dari nilai realisasinya, sektor prioritas sebagian besar desa di Papua Barat adalah sektor pembangunan desa dimana nilai realisasinya pada tahun 2021 mencapai Rp661,7 miliar atau sebesar 55% dari total realisasi dana desa di Papua Barat. Dari realisasi pembangunan desa tersebut, kegiatan dengan penyerapan terbesar adalah pembangunan rumah layak huni dengan total nilai mencapai Rp337,3 miliar. Rumah layak huni yang dibangun pada tahun 2021 mencapai 10.143 unit.



Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemecahan akar masalah kemiskinan khususnya pada pemecahan masalah keterbatasan layanan/infrastruktur. Selain bidang pembangunan desa, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak juga menjadi prioritas pemerintah desa.

Salah satu bentuk dari belanja pemerintah desa pada bidang ini adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Pemberian BLT merupakan bagian dari program perlindungan sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di desa. BLT diberikan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 serta untuk mendorong konsumsi masyarakat. Sejak tahun 2020, bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa diberikan kepada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19, dan keluarga yang belum menerima bantuan sosial lainnya. BLT ini diberikan dalam bentuk uang tunai yang langsung diberikan kepada warga desa. Mengingat pentingnya peran BLT dalam pemulihan ekonomi di desa, alokasi penyaluran dana desa untuk BLT pada tahun 2022 minimal 40% dari total pagu setiap desa.

### **Rekomendasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dengan Dana Desa di Papua Barat**

Menurut Alawiyah dan Setiawan (2021), hal yang diperlukan untuk mencapai pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal adalah

adanya pemberdayaan masyarakat. Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat pada segala aspek permasalahan dan kebutuhan hidup lingkungan di sekitarnya. Prinsip ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan FPP (2011) yang menekankan pentingnya perhatian khusus pada masyarakat adat, keterlibatan dan kerjasama yang partisipatif antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait.

Pemberdayaan masyarakat termasuk dalam salah satu bidang belanja dana desa. Pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam berbagai bentuk pengadaan dan kegiatan.

Sebagai contohnya, capaian bidang pemberdayaan masyarakat sampai dengan 31 Desember 2021 adalah bantuan perikanan sebanyak 4.938 paket, lumbung desa 1.330 paket, dan alat pertanian yang diserahkan sebanyak 4.619 unit. Dilihat dari contoh capaian tersebut, pemberdayaan masyarakat mengarah langsung pada kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan bidang prioritas dalam alokasi dana desa.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Masalah kemiskinan adalah masalah yang cukup kompleks dan rumit. Oleh karena itu, identifikasi penyebab dan akar masalah kemiskinan perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum maupun detail terkait

masalah kemiskinan. Identifikasi penyebab dan akar masalah kemiskinan telah dilakukan dengan metode *root caused analysis* menggunakan *fishbone diagram*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ada empat penyebab masalah kemiskinan di Papua Barat yaitu rendahnya IPM, rendahnya pertumbuhan ekonomi, keterbatasan aset/modal, dan budaya/kearifan lokal yang melekat. Berdasarkan penyebab yang telah diidentifikasi, dapat dianalisis akar masalahnya. Akar masalah IPM adalah pendidikan yang disebabkan rendahnya alokasi anggaran program pendidikan, kemudian kesehatan yang disebabkan rendahnya alokasi APBD untuk kesehatan, dan terakhir pengeluaran per kapita yang salah satunya disebabkan tingkat pengangguran. Adapun akar masalah pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya daya beli masyarakat. Sedangkan keterbatasan aset/modal memiliki akar masalah sulitnya akses pembiayaan dan keterbatasan layanan/infrastruktur publik. Sementara itu, budaya/kearifan lokal yang melekat memiliki akar masalah ketergantungan dan kecintaan masyarakat pada alam dan penggunaan alat/sistem/sarana tradisional. Setelah akar masalah dianalisis, maka dapat dilakukan identifikasi kebijakan yang sudah ada terkait penanggulangan terhadap akar masalah kemiskinan melalui dana desa. Budaya/kearifan lokal yang melekat berpotensi menjadi akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan masyarakat pada alam dan

minimnya pengetahuan atas hak-hak dan sumber daya alam serta penggunaan alat/sistem/sarana tradisional. Kebanyakan masyarakat menolak menggunakan alat/sistem/sarana modern karena takut merusak alam. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat mendorong keterlibatan aktif masyarakat pada segala aspek permasalahan dan kebutuhan hidup lingkungan di sekitarnya. Pemberdayaan masyarakat sudah ada dalam dana desa. Dilihat dari capaiannya, pemberdayaan masyarakat mengarah langsung pada kearifan lokal masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan bidang prioritas dalam dana desa. Adanya prioritas pada bidang pemberdayaan masyarakat akan membantu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Papua Barat khususnya masyarakat adat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi aktif diharapkan mampu mengatasi permasalahan budaya/kearifan lokal di Papua Barat yang akan berdampak pada kebijakan pengentasan kemiskinan. Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengentaskan kemiskinan di Papua Barat khususnya wilayah pedesaan adalah sebagai berikut.

1. Pengadaan bidang prioritas pemberdayaan masyarakat pada alokasi dana desa. Adanya bidang prioritas pemberdayaan masyarakat dapat menjadi

- perhatian pemerintah daerah sehingga fokus terhadap pemberdayaan masyarakat Papua Barat.
2. Program perlindungan sosial harus tetap dilanjutkan untuk memberikan *social safety net* bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Selain itu program pemulihan ekonomi lainnya juga harus tetap dilanjutkan dengan fokus awalnya dari desa. Mengingat sebagian besar masyarakat miskin di Papua Barat tinggal di perdesaan.
  3. Penyediaan sarana infrastruktur yang layak dan memadai di daerah perdesaan dan sulit dijangkau terutama sarana pendidikan, kesehatan dan transportasi harus tetap dipertahankan dengan cara mengoptimalkan penggunaan dana desa.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini belum mengukur secara kuantitatif korelasi antara penyerapan dana desa masing-masing bidang terhadap pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan penelitian perlu dilakukan pengukuran dan pengolahan data kuantitatif agar bisa menentukan hasil yang akurat dalam memilih bidang prioritas dana desa.

## REFERENSI

Alawiyah, Tuti dan Farhan Setiawan. 2021. Pengentasan Kemiskinan

Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Desa. *Jurnal Sosiologi USK*, vol 15 (2) :131-154

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2021. *Statistik Daerah Provinsi Papua Barat 2021*. Manokwari.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2021. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat 2020*. Manokwari.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. 2022. *Berita Resmi Statistik*. No. 06/01/91 Th.XVI, Manokwari.

Ciocoiu, Carmen & Ilie, Gheorghe. (2010). *Application Of Fishbone Diagram To Determine The Risk Of An Event With Multiple Causes. Management Research and Practice*. 2. 1-20.

Forest Peoples Programme. 2011. Papua dan Papua Barat: Redd+ dan ancaman terhadap masyarakat adat . *Seri briefing hak-hak, hutan dan iklim – Oktober 2011*. Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. 2022. *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Manokwari.

Mauro, Vincenzo & Biggeri, Mario. (2018). *Towards a more 'Sustainable' Human Development Index: Integrating the environment and*

- freedom*. Ecological Indicators. 91. 10.1016/j.ecolind.2018.03.045.
- Indonesia selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi) *JIBEKA* Vol 11 (2)
- Parinusa, S.M., & Waimbo, D.E. (2020). *Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009-2019*.
- Rifqy, Muhammad dkk. 2020. *Analisis Indeks Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua Barat Tahun 2019*. Universitas Gadjah Mada.
- Rooney, James J. dan Lee N. Vanden Heuvel. 2004. *Root Cause Analysis For Beginners*. ABSG Consulting Inc., Knoxville, TN.
- The World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001 : Attacking Poverty*. Oxford University Press
- Tubaka, Saddam (2019). Analisis Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia. *Cita Ekonomika*, 13(2), 113-130.
- Williams, Patricia M. 2001. *Techniques for Root Cause Analysis*, Baylor University Medical Center Proceedings, 14:2, 154-157
- World Wildlife Fund. 2010. *Studi Kelayakan : Pendanaan Konservasi Berkelanjutan Tanah Papua*. Indonesia.
- Zuhdiaty, Noor dan David Kaluge. 2017. Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di